Pembinaan Administrasi Negara Sebagai Bagian Dari Pembangunan Nasional Indonesia

Oleh :
PROF. DRS. SOEMPONO DJOJOWADONO

FAKULTAS SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
JOGJAKARTA

Jang terhormat saudara Rektor Universitas Gadjah Mada,
Jang terhormat saudara Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Gadjah Mada,
Jang terhormat saudara Ketua dan anggauta-anggauta Dewan Penjantun Universitas Gadjah Mada,
Jang terhormat saudara-saudara Guru Besar, saudara-saudara Dekan Fakultas dan Direktur Lembaga dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada,
Saudara-saudara Dosen, Assisten, Pegawai dan Mahasiswa anggauta Civitas Academica Universitas Gadjah Mada jang kami hormati,
Para Tamu dan hadlirin sekalian kami muliakan.

Dengan administrasi negara [1]) atau public administration biasanja jang dimaksud ialah bahagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan dalam pemerintahan negara jang :

- tugasnja tidak semata-mata mendjalankan kekuasaan negara dibidang politik untuk menetapkan kebidjaksanaan umum pemerintahan (public policy), undang-undang dan peraturan hukum lainnja, seperti dinegara kita Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dipusat maupun didaerah,
- tidak terutama mendjadi alat negara penegak kekuasaan dan penegak hukum, seperti angkatan bersendjata, kepolisian negara, kedjaksaan dan kehakiman,
- melainkan bahagian dari pemerintahan eksekutif baik dipusat maupun didaerah jang tugas kegiatannja terutama melaksanakan kebidjaksanaan pemerintah (public Policy), jang telah ditetapkan oleh instansi jang berwenang [2]), chususnja menjelenggarakan kepentingan umum masjarakat, atau mendjalankan public service untuk memnuhi public interents [3]) dalam bidang sosial (kesehatan, kesedjahteraan sosial dll), bidang ekonomi (pertanian, perindustrian, perdagangan, dsb), bidang rochani dan kebudajaan (agama, pendidikan, pengadjaran, kesenian) dll.

Dalam hubungan dengan pembatasan diatas ini dapatlah ditjatat bahwa pada umumnja para kepala eksekutif (Presiden, Menteri, Kepala Daerah) menduduki fungsi rangkap [4]) :

a. fungsi politik, jaitu bersama-sama dengan badan perwakilan rakjat atau sendirian menetapkan kebidjaksanaan pemerintahan atau menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang dan peraturan hukum lainnja jang telah ditetapkan sebelumnja oleh instansi jang lebih tinggi, dan
b. fungsi administrasi, jaitu memimpin pelaksanaan tugas-tugas public service, memimpin sebagian dari administrasi negara.

Selain itu perlu djuga diterangkan bahwa pembatasan itu hanjalah dalam pengertian, sebab dalam praktik tidak ada pemisahan jang tadjam antara pelbagai lembaga negara dan pemerintahan serta tugas kewenangannja itu.
Demikianlah dengan fungsi politik dan fungsi administrasi; dalam pengertian keduanja supaja dipisahkan satu sama lain, administrasi tidak mentjampuri penetapan policy, harus netral, tidak boleh menilainja, hanja harus melaksanakannja, akan tetapi dalam kenjataannja lebih-lebih dalam zaman modern sekarang ini dengan masalah-masalahnja jang sangat kompleks jang pemetjahannja banjak memerlukan kerdjasama antara banjak pihak dengan matjam-matjam pengalaman dan pelbagai pengetahuan jang kadang-kadang bersifat specialistis, maka tidaklah

mungkin fungsi politik dalam pemerintahan dilakukan dengan baik tanpa kerdja sama atau tanpa bantuan dari administrasi; praktik sekarang menundjukkan bahwa administrasilah jang biasanja menjiapkan, jang merentjanakan apa jang akan ditetapkan mendjadi public policy oleh jang berkewenangan politik, dan setelah ditetapkan public policy itu administrasi lagilah jang dibebani tugas dan tanggung jawab agar apa jang digariskan dalam public policy itu diudjudkan atau mendjadi kenjataan. Baik dalam taraf mempersiapkan maupun dalam taraf melaksanakan maka tidaklah mungkin administrasi bebas sama sekali dari unsur penilaian. Dalam seluruh proses tersebut diatas ini jang administrasi tidak ikut hanjalah pada taraf keputusan (decision making).

Besarnja administrasi negara serta luas kegiatannja tergantung kepada harapan-harapan rakjat akan djasa-djasanja untuk menjelenggarakan atau melindungi kepentingan-kepentingannja [5]).

Pada waktu negara-negara masih diperintah oleh radja-radja jang berkekuasaan absolut rakjat tidak dapat mengharapkan djasa dari pemerintahnja, public service tidak ada, jang ada hanjalah penjelenggaraan kepentingan2 jang berkuasa, alat-alat jang diperlukan hanjalah penegak kekuasaan radja itu (angkatan perang, pengumpul upeti atau padjak dsb).

Dalam abad 18 dinegara-negara barat dibawah pengaruh faham individualisme, diperkuat oleh faham liberalisme dalam kehidupan ekonomi, rakjat masih bersikap tjuriga terhadap kekuasaan negara, jang diharapkan hanjalah agar masing-masing orang dibiarkan mengurusi kepentingannja sendiri-sendiri (laisser faire) dan agar pemerintah tidak tjampur tangan (non intervensi) kedalam kehidupan masjarakat; sedjauh-djauhnja negara hanjalah dibenarkan bertindak apabila penggunaan kebebasan oleh sesuatu fihak njata-njata telah mengganggu atau menghalangi kebebasanfihak-fihak lainnja, atau mengganggu ketertiban umum, dan mengadili djika terdjadi pertentangan atau perselisihan antara para warga atau golongan warga masjarakat. Djadi public service dalam arti penjelenggaraan kesedjahteraan masjarakat djuga belum nampak.

Baru mulai dalam abad 19 setelah dirasakan bahwa kebebasan individu dan non-intervensi negara disamping seginja jang positif djuga telah banjak menimbulkan matjam-matjam kepentingan dan ketidak adilan dalam masjarakat, semakin banjak kepentingan-kepentingan dari golongan besar masjarakat tidak terselenggara karena jang berkepentingan sendiri tidak mampu menjelenggarakannja (sosial ekonomis sangat lemah), mulailah terdengar suara-suara jang mengharapkan agar pemerintah mengulurkan tangannja, memberikan djasa atau servicemja guna mengadakan perbaikan-perbaikan dalam masjarakat. Hasil-hasil permulaan dari public service telah mengurangi ketjurigaan masjarakat terhadap kekuasaan negara, kemudian lambat laun semakin bertambah pengertian masjarakat bahwa kekuasaan negara dapat dimanfaatkan guna penjelenggaraan kepentingan umum rakjatnja, dan dengan semakin besarnja harapan-harapan rakjat akan djasa-djasa dari pemerintah bagi penjelenggaraan matjam-matjam kepentingannja semakin besar pulalah administrasi negara jang harus memenuhinja. Dan dalam abad 20 ini, chususnja sesudah kedua perang dunia rata-rata administrasi negara telah tumbuh demikian besarnja dan kegiatannja demikian luasnja hampir mentjakup segala segi kehidupan masjarakat, djasmaniah dan rochaniah [6]).

Public service jang selalu bertambah luas akibatnja djuga menelan bagian jang semakin besar dari pendapatan negara, maka tumbuh pulalah harapan harapan agar public service itu didjalankan dengan lebih baik, lebih ekonomis dan lebih effisien [7]), dan achirnja dibawah pengaruh gerakan management ilmiah (Taylor-Fayol) jang sudah berkembang dan memberikan hasil hasil jang baik dalam dunia usaha swasta maka untuk selandjutnja effisiensi mendjadi tudjuan pula dari setiap usaha pembinaan administrasi negara dimana sadja [8]).

Kebutuhan akan pembinaan administrasi negara itu disatu fihak telah menimbulkan kebutuhan akan diselenggarakannja pendidikan jang baik bagi tjalon pedjabat administrasi negara dan dialin fihak melalui penelitian dan pemikiran kebutuhan akan adanja pengetahuan jang teratur sistimatis atau ilmu jang dapat diadjarkan kepada tjalon pedjabat pedjabat administrasi negara itu.

Dalam hubungan ini dapatlah ditjatat bahwa kaisar Friedrich Wilhelm I dari Prussia (Djerman) jang dalam sedjarahnja sering disebut sebagai salah seorang verlcht dospoot, jaitu radja jang berkekuasaan absolut tetapi menggunakan kekuasannja itu untuk menjedjahterakan rakjatnja, pada tahun 1727 untuk pertama kalinja telah mengangkat beberapa orang guru besar untuk menjelenggarakan pengadjaran tinggi bagi para tjalon pedjabat administrasi negara, dan pada awalnja jang diadjarkan tidak lain dari praktik administrasi negara jang baik dan tjara-tjara penjelenggaraan dinas pemerintahan setjara lantjar 9).

Gerakan mendirikan perguruan tinggi administrasi negara dinegara-negara lain berlangsung sepandjang abad 19 dan permulaan abad 20 : jaitu : Swedia (pada achir abad 18), Perantjis (awal abad 19) chususnja sesudah restorasi tahun 1815, Spanjol (1831 – 1842), Jugoslavia (1845), Turki (1856), Uruguay (1878), Brazirl (1879), Amerika Serikat (1887) dan Australia (1916), sedang negara-negara Asia menjusul sesudah perang dunia II dengan bantuan P.B.B. dan negara-negara lain jang sudah madju dalam public administration, chususnja Amerika Serikat [10]).

Perlu ditjatat, bahwa ada tendensi perbedaan dalam approach pengembangan ilmu administrasi negara di Europa dan Amerika Serikat; di Eropa tekanan diletakkan kepada segi juridis dari pada administrasi negara (hukum administrasi), sedang di Amerika di Amerika Serikat perhatian terutama ditudjukan kepada segi-segi non juridis dari public adinistration, tentang organisasi dan managementnja, tentang struktur dan prosedurnja, guna menemukan prinsip-prinsip demi kelantjaran, effisiensi dan effektivitas administrasi negara. Konsepsi pembinaan POSDCOPB misalnja (singkatan dari Planing, Organizing, Staffing, directing, coordinating, reporting dan budgeding) adalah sebagian dari hasil pengembangan segi non juridis dari public administration itu.

Selandjutnja pemusatan perhatian kepada segi non-juridis itu ternjata telah memungkinkan Amerika Serikat menduduki tempat istimewa dalam usaha pengembangan pengadjaran, teori dan research public administration dibanding dengan negara-negara lainnja. Untuk menggambarkan perkembangan jang pesat dalam ilmu dan pengadjaran public administration di Amerika Serikat dapat dikemukakan angka-angka sbb :

1930 – 1931	.... 12 universitas menjelenggarakan graduate program penuh dalam public administration, sedang 19 universitas memberikan peladjarn bagian2 dari ilmu itu,
1940 - 79	Universitas dengan program penuh,
1948 - 117	idem.
1953 - 130	idem.
1960 - 145	idem [11]).

Djuga Perserikatan Bangsa Bangsa ternjata telah memberikan perhatiannja kepada masalah pembinaan administrasi negara chususnja melalui training jang dimulai dengan adanja resolusi Sidang umum P.B.B. tahun 1946 No. 58 (I) tentang program memadjukan kesedjahteraan sosial; pelaksanaan program ini dalam bentuk pemberian bantuan tehnis jang didalamnja termasuk pemberian felowships dan scholarships dalam public administration. Kemudian pada tahun 1948 dikandung maksud untuk mendirikan international centre for training

in public administration sebagaian dari Sekretariat P.B.B., akan tetapi maksud itu kemudian diurungkan dan sebagai gantinja pada tahun 1951 pada sekretariat P.B.B. diadakan Division for Public Administration jang diberi tugas melaksanakan pemberian bantuan tehnis P.B.B. kepada negara-negara anggauta dalam penjelenggaraan latihan latihan dalam rangka pembinaan public administration dinegaranja masing-masing 12), jang dipandang lebih besar manfaatnja daripada latihan di International Centre for training tsb, dimuka.

Bahwasanja P.B.B. telah memberikan perhatian jang besar dan memberikan bantuan tehnis dalam bidang pembinaan administrasi negara melalui latihan-latihan, disebabkan karena timbulnja kejakinan jang didasarkan atas kesimpulan kesimpulan dari misi-misi jang dikirim P.B.B. ke negara-negara jang sedang berkembang untuk mengadakan survey tentang kebutuhan-kebutuhan mereka bagi pembangunan nasional, jang menekankan akan pentingnja arti pembinaan administrasi negara jang merupakan basis mutlak untuk, atau sebagai pendahuluan jang essensial bagi suksesnja pelaksanaan setiap program sosial dan ekonomi 13).

Dengan tujuan singkat tentang perkembangan pendidikan dan ilmu administrasi negara diluar negeri seperti tersebut dimuka sebagai pendahuluan marilah kita sekarang mengalihkan perhatian kepada masalah administrasi negara dinegara kita sendiri.

Tudjuan kemerdekaan bangsa kita adalah pembentukan masjarakat Indonesia jang adil dan makmur djasmani dan rochani berdasarkan falsafah Pantja Sila jang digariskan tjukup djelas dalam Undang-undang Dasa 1945 baik dalam Pembukaannja, maupun dalam pelbagai pasalnja, seperti diantaranja : pasal 27 ayat 2 (tentang pekerdjaan dan penghidupan jang lajak), pasal 29 (tentang agama dan kepertjajaan), pasa 31 (tentang pendidikan pengadjaran), pasal 32 (tentang kebudajaan), pasal 33 (tentang perekonomian), pasal 34 (tentang fakir-miskin) dll.

Panitja Persiapan Kemerdekaan Indonesia 14) jang pada tanggal 18 agustus 1945 telah menetapkan Undang-undang Dasar 1945 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia jang pertama, pada tanggal 19 Agustus 1945 disamping menetapkan pembagian daerah Republik Indonesia dalam 8 propinsi, telah pula menetapkan susunan Pemerintah Republik Indonesia jang pertama, terbagi atas 12 Departemen dengan perumusan tugas masing-masing, jalah Departemen2 :

1. Dalam Negeri (Pangreh, Pradja, Polisi, Kooti, Agraria dsb).
2. Luar Negeri.
3. Khakiman (pengadilan, pendjara, kedjaksaan, kadaster dsb),
4. Keuangan (anggaran belandja, padjak, bea, bank Indonesia dsb),
5. Kemakmuran (pertanian, industri dan keradjinan, pertukangan, ternak dan perikanan, perniagaan, tambang, kooperasi, makanan, dan keperluan rakjat, dsb),
6. Kesehatan (kesehatan, olah-raga, dsb).
7. Pengadjaran, pendidikan dan kebudajaan (pengadjaran pendidikan, kebudajaan, agama, dsb),
8. Sosial (perburuhan, fakir-miskin dsb.),
9. Pertahanan (angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, sekolah militer tinggi, dsb),
10. Penerangan (penerangan, propaganda, pemuda dsb.),
11. Perhubungan (lalu-lintas, pos, telpon, telegrap, dll),
12. Pekerdjaan Umum (pengairan, bangunan umum dll.).

Sekalipun dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan dari susunan departemen2 dalam Pemerintah Republik Indonesia jang pertama beserta perintjian tugas-

tugasnja djelas nampak bahwa rakjat Indonesia melalui Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia sedjak semula telah memberikan kepertjajaan kepada negara dan Pemerintah Indonesi untuk melakukan kegiatan jang sangat luas untuk mewujudkan masjarakat adil makmur jang ditjita-tjitakan dan dalam batas-batas kemungkinan telah diichtiarkan, djuga oleh pemerintah-pemerintah jang terbentuk kemudian, agar roda pemerintahan dapat berdjalan memenuhi harapan-harapan dari rakjatnja, namun sampai achir tahun 1949 pembinaan administrasi negara jang sungguh-sungguh teratur dan terarah kepada pembangunan masjarakat adil makmur belum mungkin dilakukan, oleh karena :

a. dalam periode ini jang mendapat pengutamaan adalah perdjoangan mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan jang telah diproklamirkan, jang sedjak semula terus-menerus mendapat tantangan dan antjaman, chususnja dari bangsa Belanda jang hendak menegakkan kembali kekuasannja di Indonesia; segala sasaran baik tenaga maupun material jang masih serba terbatas adanja haruslah dikerahkan untuk memenangkan perdjoangan itu.
b. belum terudjudnja kestabilan politik didalam diri bangsa Indonesia sendiri jang menjebabkan terlalu seringja terdjadi pergantian Pemerintah atau kabinet (dalam periode ini sampai tudjuh kali).

Baru setelah pada achir tahun 1949 perdjuangan ini dapat diachiri dengan baik dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh negara Belanda, dan melalui negara peralihan R.I.S. kemudian terbentuk negara Kesatuan Republik Indonesia pada pertengahan tahun 1950 barulah sesudah itu Bangsa Indonesia nampak melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan tugas pembangunan setjara teratur dan terarah.

Diantara langkah-langkah jang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan jang lebih njata, dapat disebut diantaranja adalah :

a. pembentukan Biro Perantjang Negara jang dipimpin oleh Ir. H. Djuanda (tahun 1952) jang mendapat tugas membantu pemerintah menjiapkan suatu rentjana pembangunan sosial, ekonomi untuk Indonesia [15]);
b. pembentukan Panitya Negara untuk menjelidiki Organisasi Kementrian[2] (PANOK) [16]) jang dipimpin oleh A. K. Pringgodigdo (Kep. Presiden No. 211/1932), dengan tudjuan mendapatkan susunan kementrian[2] jang effisien;

PANOK telah menjampaikan laporan pada tgl, 26 April 1954 jang a. l. berisi ungkapan bahwa dalam kementrian[2] terdjadi differensiasi jang berlebihan, duplikasi, organisasi dan formasi pegawai terlalu besar dll., serta mengusulkan supaya lingkungan pekerdjaan kementrian[2] ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

c. Mendatangkan tenaga[2] ahli public administrat on dari Amerika Serikat di Indonesia, ialah [17]).
    1. T. R Smith, Public administration advisor diperbantukan pada Biro Perantjang Negara (1953),
    2. Edward H. Litchfield (Dean School of Public and Business Administraion, Cornell University) dan Alan C. Rankir, team bantuan pada Universitas Indonesia (1954);

baik Smith maupun team Litchfield-Rankin telah menjampaikan laporan tentang perlunja diadakan training untuk public administration di Indonesia; dalam hubungan ini laporan berisi

pula uraian tentang pengertian administrasi, penindjauan proses administrasi menurut ilmu administrasi modern, usul[2] tentang pembentukan fakultas administrasi, pembentukan perpustakaan dan penterdjemahan buku[2] public administration program latihan pembinaan pimpinan-pimpinan administrasi, pembentukan lembaga ilmu administrasi dll.

Dari apa jang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam tahun[2] pertama sesudah 1950 seperti diuraikan dimuka, dapatlah kiranja kami berkesimpulan :

a. Bahwa sekalipun fakta[2] kegiatan jang dapat disebut administrasi negara telah ada dan dilakukan sebelum 1950, namun pengertian administrasi negara atau public administration dan tjara[2] pelaksanaannja menurut prinsip[2] administrasi jang modern rupa-rupanja setjara sistimatis baru di-introdusir ke Indonesia sedjak 1950 dan dalam tahun[-] berikutnja;
b. Bahwa telah mulai tumbuh pengakuan dan kebutuhan demi suksesnja pembangunan diperlukan administrasi negara jang mampu menggarap dan menanganinja menurut prinsip[–] prinsip dan teknik administrasi negara jang modern, maka perlulah pembinaan administrasi negara didjadikan bahagian jang integral dari rentjana pembangunans jang sedang di siapkan oleh Biro Perantjang Negara.

Demikianlah achirnja sebagai kelanjutannja dari usul[2] PANOK dan saran-saran team ahli public administration jang telah disebut dimuka, maka dalam Garis-garis besar Rentjana pembangunan Lima Tahun 1956 – 1960terdapat bab 19 tentang Adminstrasi Pemerintahan, dalam mana diantaranja dinjatakan dinjatakan bahwa suatu aparatur pemerintahan jang seffisien dengan pedjabat-pedjabat jang tjukup keahlian dan pengalaman merupakan sjarat penting bagi suksesnja pelaksanaan rentjana penbangunan, bahwa sjarat penting ini belum terpenuhi, dan bahwa kebidjaksanaan pemerintah akan selalu diarahkan kepada usaha2 untuk menjederhanakan administrasi dan aturan-aturannja, serta mempertinggi effisiensi kerdja pegawai / pekerdja negara dengan meninggikan mutu keahliannja. [18])

Tentang kekurangan tenaga-tenaga jang mempunjai keahlian dan pengalaman baik dibidang tehnis (pertanian, industri, kesehatan dll) maupun dibidang administratif, terutama pada tingkat menengah dan tinggi adalah warisan dari zaman pendjadjahan jang sangat lama tidak memberikan perhatian kepada pemberian pengadjaran dan pemberian kesempatan kerdja untuk memperoleh pengalaman bagi bangsa Indonesia. [19]) ; sekedar perbaikan baru dimulai awal abad 20, chususnja sesudah perang dunia I sebagai pelaksanaan dari apa jang mereka sebut politik balas budi (ethische politiek) dengan membuka pelbagai matjam sekolahan di Indonesia jang keadaanja djauh dari mentjukupi.

Dalam masa pendudukan Djepang keadaan persediaan tenaga ahli tidak semakin baik, melainkan sebaliknja, hal mana terbukti dari suatu penelitian jang dilakukan oleh wakil Presiden Moh. Hatta segera setelah Proklamasi Kemerdekaan dengan hasil : dari ± 600 orang sardjana hukum sebelum perang tinggal ± 100 orang sesudah Proklamasi, dari ± 1600 orang dokter sebelum perang tinggal ± 800 orang sesudah proklamasi, dan keadaan tenaga tehnik insjur lebih menjedihkan lagi . [20])

Sekalipun Garis-Garis besar Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956 – 1960 hasil karya Biro Perantjang Negara baru ditetapkan dengan Undang2 No. 58/1955, namun rantjangannja semendjak diumumkan dalam tahun 1955 telah mendjadi pedoman pelaksana pembangunan di Indonesia.

Untuk memenuhi kekurangan tenaga pembangunan jang berpendidikan tinggi jang sangat diperlukan maka Pemerintah dalam hal ini terutama Kementrian P.P. dan K, dan dunia perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta, telah segera mulai mengambil langkah2 jang perlu kearah tertjapainja maksud itu.

Pada achir tahun 1955 Universitas Gadjah Mada adalah salah satu lembaga pertama jang mendapat kehormatan untuk memberikan dharmanja memenuhi tuntutan tersebut, jaitu dengan dikeluarkannja Keputusan Menteri P.P. dan K. No. 53759/Kab/1955 tentang melengkapkan susunan Universitas Gadjah Mada guna memungkinkan perkembangan Universitas jang lebih baik, termasuk lebih mampu memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga ahli jang berpendidikan tinggi dipelbagai bidang. Sebagaimana telah kita alami, maka berdasarkan keputusan Menteri P.P. dan K itu mulai tanggal 1 September 1955 beberapa bahagian2 fakultas jang sudah dipandang dewasa telah ditingkatkan / diubah mendjadi fakultas2 jang berdiri sendiri sehingga U.G.M, jang sebelum tanggal 1 September 1955 terdiri dari 6 fakultas, mulai saat itu medjadi 13 fakultas.

Kesempatan dan kehormatan jang telah diberikan Pemerintah kepada U.G.M, telah terbukti tidak disia-siakan. Djuga dalam bidang pembinaan administrasi negara UGM. Semdjak itu telah mengambil langkah2 untuk memberikan sumbangannja, jang pelaksanaannja disalurkan melalui suatu fakultas jang menurut sedjarah pertumbuhannja memang mempunjai tugas-tugas jang erta berhubungan dengan soal2 pemerintahan dan administrasi negara, jaitu fakultas Sosial dan Politik, jang baru sadja ditingkatkan mendjadi fakultas dari bagian Sosial dan Politik fakultas H.E.S.P.

Sedjarah pertumbuhan fakultas ini sebenarnja dapat dilatjak kembali sedjak Maret 1948, pada waktu mana oleh pemerintah Republik Indonesia telah dibentuk Akademi Ilmu Politik di Jogjakarta ini dengan tugas mendidik tjalon-tjalon pedjabat negeri dalam bidang pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri dan penerangan / publisistik, jang awal kemerdekaan telah segera sangat dirasakan kebutuhannja.

Setelah UGM didirikan, maka Akademi Ilmu Politik dilebur kedalamnja mendjadi bagian Sosial dan Politik dari Fakultas Hukum, Sosial dan Politik; tugasnja tidak berubah dengan adanja tiga djurusan pemerintahan, hubungan internasional dan publisistik / kemasjarakatan. Hanja sadja sebagai bahagian dari fakultas Hukum, Sosial dan Pilitik maka bagian Sosial dan Politik djelas mendapat tjorak / karakter hukum pula; untuk djurusan pemerintahan misalnja mata peladjaran utamanja ialah Hukum Tata Negara, hukum tata pemerintahan (administratief recht), termasuk ilmu pemerintahan (bertuurskunde), sehingga jang djelas menondjol adalah segi hukumnja dari pemerintahan negara, sedang segi non-juridisnja jang diadjarkan oleh ilmu pemerintahan (bertuurskunde) baru merupakan tambahan untuk melengkapinja.

Setelah fakultas Sosial dan Politik berdiri sendiri maka dapatlah fakultas ini lebih mengembangkan sifat dan tugasnja jang non-juridis, hal mana segera nampak dari susunan peladjaran baru bagi fakultas itu jang berlaku mulai 1 September 1957 21) menurut susunan peladjaran baru ini djurusan ilmu usaha negara (public administration), jang namanja kemudian diganti mendjadi djurusan administrasi negara setelah Pemerintah dengan P.P No. 74/1957 membentuk Lembaga Administrasi Negara, sekedar untuk menjeragamkan istilah, oleh karena baik menurut pendjelasan dalam naskah-naskah pembentukanja maupun menurut usaha negara dan administrasi negara kedua2nja jang dimaksud ialah public administration.

Setelah djurusan administrasi Negara pada fakultas Sosial dan Politik UGM berdjalan beberapa tahun lamanja jang pendjelasannja mendapat bantuan dari Dr. Garth N. Jones, seorang eksper publik administration dari I.C.A, dan telah mulai menghasilkan sardjana2 dalam ilmu administrasi negara maka Universitas Gadjah Mada mengambil langkah setapak madju ladi ialah

dalam tahun 1960 membentuk : Balai Latihan dan penjelidikan tata usaha pembangunan lembaga2 masjarakat dan negara, jang kemudian diubah namanja mendjadi Balai Pembinaan Administrasi, jang tugasnja seperti tergambar dalam namanja diantaranja ialah menjelenggarakan latihan2 djabatan, penelitian, konsultasi, penerbitan, dll. dalam rangka pembinaan administasi, dan jang sedjak didirikannja hingga sekarang telah banjak sekali sumbangannja jang sangat penting artinja bagi berhasilnja pembangunan di negara kita.

Selain apa jang telah berkembangan dalam lingkungan UGM seperti diuraikan dimuka, maka djuga dalam rangka menanggapi tantangan kekurangan tenaga ahli, chususnja dalam bidang administrasi negara, seperti diungkapkan oleh Garis-garis besar Rentjana Pembangunan lima tahun 1956 – 1960 jang telah disebut dimuka, maka pada awal tahun 1957 Menteri P.P. dan K. djuga telah membentuk suatu panitya, dengan nama Panitya Perentjana Pembentukan Institute Pendidikan Tenaga Administrasi Pemerintah). Sebagai hasil kerdja dari panitya ini maka dengan peraturan Pemerintah no. 30 tanggal 6 Agustus 1957 dibentuklah Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan tugas membantu pemerintah dalam usaha menjempurnakan aparatur pemerintahan serta administrasi negara Indonesia 22).

Dengan memanfaatkan kedudukan jang langsung dibawah kabinet pemerintah Republik Indonesia, maka Lembaga administrasi Negara dalam beberapa tahun sadja sudah banjak jang dapat dikerdjakan dalam rangka pembinaan administrasi negara [23]) :

a. menjelenggarakan matjam-matjam latihan djabatan bagi pegawai-pegawai tingkat departemen,
b. menerbitkan madjalah administrasi negara,
c. menjelenggarakan Seminar dan konperensi (seminar effisiensi kerdja, seminar administrasi daerah, konperensi antar akademi dan Kursus Dinas Pemerintah dll),
d. kerdja sama dengan luar negeri (effiliasi dengan Indiana University Amerika Serikat, mendjadi anggauta dari Eastern Regional Organization of Public Administration EROPA, menghadiri seminar-seminar internasional dalam bidang administrasi negara dll),
e. mengirimkan tenaga-tenaga beladjar public administrasi ke luar negeri (baik programa training maupun graduate study) dll.

Pada achir tahun 1960 LAN dilengkapi dengan suatu perguruan tinggi jang bersifat kedinasan jang menjelenggarakan program pendidikan sardjana lengkap dalam ilmu administrasi negara, dengan nama Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara (PTDIAN) [24]).

Selain Universitas Gadja Mada dengan pembentukan djurusan Administrasi Negara pada fakultas Sosial dan Politik serta Balai Pembinaan Administrasi, dan pada tingkat Pemerintah Pusat dengan pembentukan Lembaga Administrasi Negara dan PTDIAN sebagai bagian dari LAN seperti telah diuraikan dimuka, maka disekitar tahun 1956 – 1957 telah ikut menanggapi pula perbagai Perguruan Tinggi lainnja terhadap tantangan kekurangan tenaga ahli administrasi negara, diantaranja : [25])

- Dep. Dalam Negeri membentuk Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Malang (1956), jang kemudian mendapat bantuan tenaga ahli public administration dll dari I.C.A;
- Universitas Krisna Dwipayana Djakarta membuka Fakultas Tatapradja Public Administration (1956).
- Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia membuka ekstensionPerguruan Tinggi Ketatapradjaan dan Ketataniagaan (1957);

- Universitas 17 Agustus Makasar membuka fakultas Tatapradja Public Administration (1957),
- Universitas Padjajaran membuka Fakultas Sosial dan Politik dengan djurusan public administration (1958).

Dalam Rentjana Pembangunan Nasional Semesta Berentjana 1961 – 1969 soal pembinaan administrasi negara mendapat perhatian pula.

Didalam Amanat Presiden tentang pembangunan semesta berentjana bahagian jang tertulis jang disampaikan kepada Depernas pada tanggal 28 Agustus 1959 jang oleh Ketetapan M.P.R.S No. I/MPRS/1960 dinjatakan mendjadi garis-garis besar haluan pembangunan, djadi merupakan petundjuk dasar bagi penjurusan Rentjana Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, terdapat satu bahagian mengenai administrasi negara [26]), bahwa :

- dalam pembangunan raksasa organisasi dan administrasi sangat penting artinja, menentukan berhasil atau tidaknja pelaksanaan suatu rentjana.
- karenanja prinsip2 organisasi dan administrasi jang baik harus dilaksanakan disemua instansi dan lembaga jang mengatur kebidjaksanaan politik, ekonomi dan sosial bagi masjarakat,
- birokrasi jang berlebihan, mis-management dan koropsi jang terdjadi dimana-mana, disebabkan karena kurangnja ahli-ahli terutama dalam bidang administrasi negara.
- karena itu penempatan tenaga ahli harus dipertimbangkan lebih rasional dari sudut bakar, ketjakapandan keahlian jang dibutuhkan.

Meskipun ada penggarisan demikian, akan tetapi perkembangan kehidupan politik di Indonesia sesudah tahun 1960 tidaklah memberikan suasana jang diperlukan bagi pembinaan administrasi negara :

- dengan terbentuknja Panitya Retooling Aparatur Negara (PARAN) dengan keputusan Presiden No. 10/1960 dan No. 184/1962 jang dalam bidang administrasi negara mengutamakan pembinaan politis-ideologis dari pada mempertinggi kemampuan tehnis efisiensi.
- Lebih-lebih dengan dibentuknja Komando Tertinggi Retooling alat Revolusi (KOTRAR) dengan keputusan Presiden No. 98/1964.
- dan achirnja dengan terdjadinja pembenrontakan G 30s / PKI maka sedjak achir 1965 pembinaan administrasi negara terhenti sama sekali, seperti halnja dengan pembangunan nasional semesta jang djuga terhenti seluruhnja.

Dalam rangka rehabilitasi kerusakan-kerusakan dalam administrasi negara akibat G30S/PKI, maka baru pada pertengahan tahun 1966 berturut-turut oleh Pemerintah telah diambil langkah-langkah sbb :

- pembentukan Panitya ad hoc penjempurnaan organisasi Kementrian-kementrian (PANOK) dengan instruksi Presidium Kabinet No. Ua/B 80/66, jang diperkuat oleh :
- Ketetapan M.P.R.S tanggal 5 Djuli 1966 No. XIII/MPRS/ 66 tentang Kabinet Ampera jang berisi ketentuan bahwa, sambil menunggu ketentuan-ketentuan mengenai susunan dan djumlah maksimal daripada departemen-departemen jang akan ditentukan dengan undang-undang, maka Kabinet Ampera disusun setjara sederhana, efektid dan efisien [27]) dan

- Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1965 tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi keuangan dan pembangunan, jang dalam bab IX memuat ketentuan tentang prasarat bagi berhasilnja pelaksanaan pelbagai matjam program stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan jatu diantara lain : struktur perangkat pemerintahan harus sederhana, effisien dan effektif dengan pembatasan wewenang dan tanggung jawab jang djelas, masing-masing anggautanja berdjiwa Pantja Sila pengemban ampera, ahli, dipertjaja dan memperoleh dukungan rakjat[28]).

Hasil kerdja PANOK tsb, diatas kemudian dituangkan kedalam Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 31 Agustus 1966 No. 15/U/Kep/8/1966 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, wewenang dan tata kerdja sekretariat djendral, direktorat djendral, dan inspektorat djendral pada departemen-departemen, dan Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/Kep/II/1966 tentang struktur organisasi dan pembagian tugas departemen-departemen.

Dalam Repelita 1969/70 – 1973/1974 hasil kerja Bappenas (Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional) jang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 319/1968, masalah pembinaan administrasi negara mendapat perhatian lebih besar dan tempat jang lebih penting lagi dibandingkan dengan perhatian dan tempatnja dalam rentjana2 pembangunan nasional sebelumnja, jaitu dalam buku I bab V tentang Administrasi Pemerintah, pelaksanaan rentjana dan rentjana operasionil, jang intinja : [29])

- diperlukan suatu Pemerintah, jang effektif dan effisien untuk melaksanakan program-program pembangunan jang baik.
- karena itu penjempurnaan administrasi pemerintah merupakan salah satu usaha penting jang akan dilakukan,
- tudjuan djangka pendek ; tertjiptanja effesiensi dan effektivitas dalam bidang organisasi, prosedur dan personil.
- tudjuan djangka panjang : tertjiptanja aparatur dan administrasi pemerintah jang stabil, berkelangsungan, effektif dan effesien jang bekerdja untuk kepentingan rakjat dan bukan untuk kepentingan golongan ataupun pribadi,
- administrasi pemerintah tidak lagi hanja mendjalankan “regular function” melainkan djuga “development function” mampu mendorong dan mengarahkan kepada pembangunan.

Program pembinaan administrasi negara jang digariskan dalam Repelita meliputi :

1. Penjempurnaan struktur dan organisasi,
2. Penjempurnaan prosedur,
3. Penjempurnaan kepegawaian,
4. Penjempurnaan administrasi keuangan,
5. Penjempurnaan administrasi peralatan dan perbekalan,
6. Penjempurnaan administrasi statistik,
7. Penjempurnaan administrasi Perusahaan Negara,
8. Penjempurnaan penelitian dan pengembangan Ilmu Administrasi Negara,

Untuk memperlantjar dan mengamankan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun diadakan sistem pengendalian operasionil, dengan mengadakan esktor-sektor, jaitu kegiatan-kegiatan dibidang pembangunan dan tugas pemerintah lainnja jang memerlukan pengutamaan koordinasi, integrasi dan syncronisasi antara departemen2 dan instansi setjara intensif (Keputusan Presiden No. 18.1969, [30]).

Diantara Sektor1 A-Q terdapat Sektor P., ialah Sektor Aparatur Pemerintah, dengan program :

P1 : Struktur, organiasi dan prosedur,
P2 : Personalia,

diketahui oleh Menteri Negara Penjempurnaan dan pembersihan aparatur Pmerintah, beranggauta 16 Departemen dan lembaga2 tingkat pusat, sedang mengenai tugas pokoknja disebut : menjempurnakan aparatur pemerintah agar mampu melaksanakan Repelita.

Dari apa jang diuraikan dimuka dapatlah kiranja ditarik kesimpulan, bahwa sedjak Indonesia hendak mulai dengan sungguh2 dan setjara berentjana melaksanakan pembangunan, sedjak itu pula telah diberikan perhatian kepada alat pelaksananja, jaitu administrasi negara jang terentjana segera memerlukan pembinaan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pembangunan jang dibebankan diatas pundaknja.

Pembinaan administrasi negara mendjadikan selandjutnja bahagian integral dari setiap rentjana pembangunan nasional Indonesia, baik Pembangunan Lima Tahun 1956 – 1960, Pembangunan Nasional Semesta Berentjana 1961 – 1969, maupun Pembangunan Lima Tahun 1969/70 – 1973/74.

Kebutuhan membina administrasi negara sebagai bagian dari pembangunan di Indonesia dapatlah difahami atas dasar pertimbangan subjektif dan objektif.

Subjektif : Sebagaimana dapat ditafsirkan dari Undang-undang Dasar 1945, baik dalam Pembukaannja maupun pasal-pasalnja, maka sedjak semula rakjat Indonesia mengharapkan agar Pemerintahnja memainkan peranan jang aktif memberikan darma djasanja untuk mewudjudkan tjita2 bangsa jaitu mesjarakat Indonesia jang adil dan makmur djasmani dan rochani berdasarkan Pantja Sila.

Hal ini djuga terbukti dari kenjataan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia jang pertama susunan departemen-departemennja ditetapkan oleh Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia jang kita akui sebagai penjalur aspirasi rakjat pada awal kemerdekaan kita.

Dari perintjian tugas-tugas departemen-departemen itu dapatlah digambarkan betapa luas tugas kegiatan jang segera harus dihadapinja. Untuk itu modal utama jang dimiliki bangsa Indonesia hanjalah niat dan tekad teguh, disertai dengan kesanggupan untuk sambil berdjalan melengkapi apa jang kita perlukan dan belum kita miliki. Stock-opname persediaan tenaga ahli Indonesia disegala bidang jang sangat diperlukan pada waktu kita hendak mulai melaksanakan pembangunan hasilnja ternjata sangat mengetjewakan, termasuk sangat kurangnja tenaga jang mampu menjelenggarakan administrasi negara menurut prinsip-prinsip dan tehnik administasi jang modern, maka pemetjahannja tidak dapat lain daripada keharusan melakukanpembinaan administrasi negara sebagai bahagian dari pembangunan itu sendiri.

Objektif : Pengalaman dari banjak negara-negar jang sudah medju diseluruh dunia dalam proses pertumbuhannja membuktikan betapa eratnja hubungan antara administrasi negara dan pembangunan itu. Perkembangan administrasi negara, ilmu administrasi negara dan pendidikan ilmu administrasi negara sepandjang abad 19 dan mentjapai titik puntjak dalam abad 20, chususnja sesudah kedua perang dunia, membuktikannja pula.

P.B.B dalam rangka program bantuan tehnis bagi negara2 anggauta jang sedang membangun, telah memberikan perhatian dan bantuan pula dibidang pembinaan negara , chususnja kepada negara-negara jang sedang berkembang; apa jang dilakukan dan apa jang dinjatakan dalam hubungan itu membuktikan pula eratnja hubungan pembangunan dan pembinaan administrasi begara :

a. Dalam tahun 1951 suatu publikasi P.B.B. menjatakan sebagai berikut : "The importance of improving the public administrasi is a neccessary basis for, or an essensial preliminary to, the successful execution of the economic and social proframmes" 31).
b. Setelah sepuluh tahun pengalaman melaksanakan bantuan tehnis suatu publikasi P.B.B. dalam tahun 1961 menjatakan ; "Administrative improvment is the since qua non in the implementation of programmes of national development" 32)
c. Publikasi PBB tahun 1966 menjatakan ; "... that national development is not limited to the newly independent and non industrialized countries which are usually referred to as the under developed areas. In fact, all countries of thee world are under developed, and they all must give attention to adjustingtheir administrative institution to the new demands. In these matters, the to-called advaced and the less developed countries differ only in degree" 33)

Pengakuan pentingnja pembinaan administrasi negara dalam rangka pembangunan nasional djuga dinjatakan oleh negara2 jang sedang berkembang dibagian dunia lain, jang diantaranja dapat kita ketahui dari :

a. International conference on public administration in developing countries, diselenggarakan oleh Advanced School of Public Administration di Bogota, Colombia tahun 1963, dengan peserta utusan2 dari negara-negara Amerika Latin, 34).
b. Seminar Public Administration and economic development, diselenggarakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) di Alcala de Henares Spanjol tahun 1965 dengan peserta2 dari Junani, Portugal, Spanjol, Turki dan Jugoslavia. 35)

Djadi baik subjektif maupun objektif maka ditempatkannja pembinaan administrasi negara sebagai bahagian dari pembangunan nasional Indonesia dapat dibenarkan.

Bahwasanja setelah sekian lama dilakukan usaha pembinaan administrasi negara di Indonesia sebagai bagian dari pembangunan nasional, masih djuga belum ditjapai hasil jang memuaskan, masih terdjadi banjak korupsi, mismanagement dan penjakit administrasi lainnja, keadaan demikian ini djanganlah hendaknja ditafsirkan bahwa usaha pemninaan administrasi negara itu dengan demikian tidak ada artinja, melainkan sebaliknja, kenjataan-kenjataan itu djustru menguatkan betapa kompleknja masalah-masalah administrasi negara itu, dan betapa mutlak perlunja setjara kontinu pembinaan itu harus dilakukan dan merupakan tjambuk bagi kita

untuk selalu meningkatkan ichtiar kita. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa hasil-hasil penelitian dalam bidang administrasi negara itu beroperasi, politik, sosial, ekonomi, kebudajaan dll; perbaikan administrasi negara diharapkan dapat membantu usaha perbaikan dibidang-bidang lainnja, akan tetapi pada waktu jang bersamaan keadaan bidang-bidang lain itu berpengaruh terhadap administrasi negara, terhadap usaha perbaikannja, dan terhadap hasilnja.

Dalam keadaan demikian pekerdja ilmu administrasi negara tidak lagi dapat bekerdja sendirian untuk memahami dan memetjahkan masalah-masalah administrasi negara, untuk membina administrasi negara, kerdjasama dengan pekerdja-pekerdja ilmu lainnja (ilmu politik, ilmu hukum, anthropologi, sosiologi, ekonomi, psychologi dll) mutlak perlu, tidak hanja dalam bentuk approach interdisclipliner, melainkan suatu approach jang pan-discliplinear, suatu integrated joint effort antara pekerdja-pekerdja pelbagai ilmu itu. 36).

Menghadapi tantangan2 jang datang dari masalah-masalah administrasi negara Indonesia dan program pembinaannja jang sangat luas seperti digariskan dalam Repelita, tanggapan kami para pekerdja dan siswa ilmu administrasi negara tidak dapat lain daripada bekerdja keras memberikan sumbang bakti kami sekalijan, kerdja keras masing-masing sendiri dan setjara kerdjasama, kerdjasama antara para pekerdja dan siswa ilmu administrasi negara sendiri dan kerdja sama dengan pekerdja2 dan siswa2 ilmu-ilmu lainnja, interdiscliplinear dan pan-discliplinear, bahkan djuga kerdja sama dengan siapapun dan badan manapun jang langsung ataupun tidak langsung ikut menggarap dan berpengaruh terhadap pembinaan administrasi negara kita.

Hadirin sekalian jang kami muliakan,

Untuk mengachiri uraian kami ini pekenankanlah kami menggunakan kesempatan ini untuk mengeluarkan dan menjatakan perasaan terima kasih kami jang sedalam-dalamnja dan penghormatan jang setinggi-tingginja kepada almarhum ajah kami jang sewaktu hidupnja dengan tanpa banjak kata melainkan dengan djiwa dan perbuatannja telah membentuk dan membimbing kami hingga kami dapat mentjapai djabatan guru besar ini; demikian pula kepada ibu kami jang hingga kini dengan kasih sajangnja masih tetap mendampingi dan mangjomi kami.

Terima kasih dan penghormatan djuga kami sampaikan kepada sekalijan guru pengasuh kami, dan kepada para guru besar gabungan fakultas-fakultas Hukum, Ekonomi dan Sosial Politik jang dalam tahun 1962 telah memberanikan diri mengusulkan kami untuk pengangkatan sebagai guru besar dalam ilmu administrasi negara, chususnja Prof Drs Notonagoro S.H dan Prof. Hardjono S.H. jang telah sudi membimbing kami sewaktu kami memulai karier kami sebagai pekerdja akademis pada Universitas Gadjah Mada ini.

Terima kasih pula kami sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia jang telah mengangkat kami mendjadi guru besar dalam ilmu administrasi negara terhitung mulai tanggal 1 September 1964; semoga dengan Petundjuk dan Bimbingan Tuhan Yang Maha Murah dan Maha Kasih kami mampu memenuhi tugas jang dipertjajakan kepada kami itu.

Achirnja penghargaan kami berikan kepada Istri dan anak-anak kami jang dalam segala duka dan suka selalu berada disamping kami, dan merupakan sumber kekuatan dan sumber inspitasi jang tidak pernah kering bagi kami untuk mendjalankan segala tugas kewadjiban kami;

dan terachir kasihku kepada dua orang tjutju kami Dani dan Desi Utami jang setahun jang achir ini telah memberikan tambahan kekuatan baru kepada kami.

Hadirin jang terhormat,

Terimakasih atas kehadiran, perhatian dan kesabaran saudara-saudara sekalijan.

-

TJATATAN PUSTAKA :

1) Dalam naskah-naskah resmi pemerintah untuk pengertian public administration dipakai dua istilah setjara bergantian, ialah administrasi negara dan administrasi pemerintah (an) seperti misalnja dalam "Garis2 Besar Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956 – 1960" hasil karya Biro Perantjang Negara" Rentjana Pembangunan Nasional Semesta Berentjana 1961 – 1969" hasil karya Depernas; dan "Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1959 / 70 – 1973 / 74" hasil karya Bappenas.
2) Leonard D. white, Introduction to the study of administration, (New York 1955) edisi 4 halaman 1;
3) Andre Molitor, The University Teaching of Social Sciencce Public Administration, Unesco 1959 No. S5.58/VIII.I.10/A. hal 18;
   Fritz Moratein Marx, Element of Public Administration, (Englewood Cliffs N.J. 1959) edisi 2, hal 12;
4) Fritz Moratein Marx ibid hal 8;
5) Leonard D-white op.cit. hal. 3-5;
6) ibid.
7) Herbert A Simon dkk, Public Administration, (New York 1961) hal 16-17;
8) Fritz Moratein Marx op. cit. hal 20;
9) Andre Molitor op. cit hal. 27;
   G.A. van Poelje, Algemeene Inleiding tot do Bestuurskunde (Alphen a.d. Rijn 1942) hal 9;
10) Andre Molitor op. cit. hal 27-41;
11) Handbook of Training in the public service (United Nations Publication no. 66.Ii, H. 1-1966 Hal. 37;
12) ibid hal 4 – 5;
13) Standards and technique of public administration with special reference to technical assistence for under-de veloped countries (U.N. publication no.51.II.B 7) hal. 7;
14) Kusnodiprojo. Himpunan Undang2, Pwearturan penetapan2 Pemerintah Republic Indonesia 1945 (Djakarta 1951) hal. 115 – 116;
15) Ir. Soenjoto Prawirodidjo, Sedjarah Perkembangan Perentjanaan di Indonesia dari masa kemasa, Institut Ilmu Pemerintahan Malang 1970, hal. 2.
16) Garis-garis besar Rentjana pembangunan lima tahun 1956 – 1960, Biro Perantjang Negara 1955, hal. 269.
   Research di Indonesia bidang ekonomi, Sosial dan budaja (Dep. Urusan Research Republik Indonesia 1965) hal. 22.
17) Reasearch di Indonesia ibid hal. 23.
18) Garis-garis rentjana pembangunan lima tahun op. cit. hal. 269-271;
19) Bruce Glassburner, Hifh level manpower for economic development:The Indonesia experience, dalam "Manpower and Education' Harbison-Meyera (ed) Mc. Graw Hill 1965, hal. 175.
20) ibid. hal. 176.
21) Buku petundjuk Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Jogjakarta 1967, hal. 5-6.
22) Research di Indonesia op. cit. hal. 28-29.

23) Setahun Lembaga Administrasi Negara, dalam Madjalah Administrasi Negara (sd. LAN) Tahun I no. 5, Mei 1959 hal. 149-150.
24) Research di Indonesia, op. cit. hal. 41;
25) ibid hal. 30-31;
26) Buku betetapan M.P.R.S No. I I/MPRS/1960, ed MPRS-Deppen 1961. hal. 113.;
27) Himpunan Ketetapan-ketepan MPRS, tjetakan II ("Penerbit Pantjuran Tudjuh" Djakarta 1969), hal. 18,
28) ibid hal. 82.
29) Repelita, penerbit "Do'a Restu" Bandung, tjetakan II 1969. hal. 113-125.
30) ibid hal. 659-688.
31) Standards and Techniques of Public administration with special reference to technical assistance for under-developed countries (publikasi P.B.B New York 1951 No. 51.II.B.7) hal. 7,
32) A. Handbook of Public administration : Current concepts and practice with special reference to developing countries (Publikasi P.B.B New York. 1961 No.61.II.H.2) hal. 1;
33) Handbook of training in the Public service, (Publikasi P.B.B New York. 1966 No.66.II.H.1) hal. 1;
34) Martin Kriesberg (ed), Public administration in developing countries, (Brookings Institution, Washington D.C. 1965)
35) Public administration and economic development (Publikasi OFCD-Organization for Economic Co-operation and development Paris 1966).
36) Fred W. Riggs, Administration in developing countries-the theory of prismatic society, (Houghtoa Miffin co Boston 1968) hal. 50-95.

RALAT

NO	Baris atas / bawah	Tertulis	Seharusnja
3	3 b	dibawa	dibawah
4	10 a	dapatla	dapatlah
	12 a	ver icht dospoot	verlicht despoot
	16 b	(916)	(1916)
	9 b	di Amerika	_ _ _ _ _ _
	2 b	budgeding	budgeting
5	16 b	sebagian	sebagian
		cen te	centre
		sebagian	sebagai bagian
6	19 b	pembagiaa	pembagian
7	17 b	sasaran	sarana
8	4 a	puplic	public
9	18 a	serta	serta
10	10 b	sebenarnja	sebenarnja
11	17 a	kerlaku	berlaku
	7 b	fenbinaan	Pembinaan
12	1 a	barkembang	berkembang
13	4 a	19 6 – 1957	1956 – 1957
	8 a	M lang	Malang
	2 b	J ng	jang
14	1 a	perkemi-	perkem-
21	9 a	2)! Leonord D white	Leonard D White
		study of administratian	Study of Public Administration
22	4 a	Bentjana	Rentjana
	8 b	betetapan	Ketetapan